

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan sebuah upaya pemerintah guna mendukung dan meningkatkan suatu pendidikan di Indonesia khususnya kebijakan ini dibuat untuk masyarakat yang dinilai kurang mampu. Suatu kebijakan bisa dikatakan berjalan atau tepat apabila kebijakan tersebut di implementasikan atau dilaksanakan oleh implementor atau pelaksana yang memiliki memang memiliki keahlian dalam bidangnya.

Dari hasil peneitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Proses Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah dilaksanakan Oleh lembaga pendidikan terkait khususnya terhadap masyarakat kecamatan kaliwates. Dalam pengimplementasiannya kebijakan ini memang sudah dijalankan oleh implementor atau pelaksana dilapangan sesuai dengan isi dari Kebijakan KIP itu sendiri mulai dari

1. Proses penyuluhan Kebijakan KIP kepada masyarakat terutama siswa – siswa mulai dari SD hingga SMA.
2. Proses Mendapatkan KIP.
3. Proses Penentuan masyrakat yang berhak menerima KIP.
4. Proses Monitoring hingga proses evaluasinya.

Dari pengimplementasiannya dilapangan tentunya implementor atau pelaksana kebijakan harus sesuai dengan standard operasional atau SOP yang telah diberikan oleh pemerintah guna tercapainya tujuan tanpa ada kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan bisa dikatakan berjalan apabila sebuah kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu tingkat efektivitas peran kerja implementor harus sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah dan tentunya oleh masyarakat. Dan dapat diketahui bahwa efektivitas peran pelaksana dilapangan dalam pengimplementasiannya di Kecamatan Kaliwates sudah berjalan dengan baik namun nyatanya dalam hal pengimplementasiannya dilapangan masih kurang dengan diindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang terkadang merasa kesulitan untuk mendapatkan KIP, hal ini tentunya menjadi koreksi tersendiri kepada implementor lembaga yang menjalankan

sebuah kebijakan tersebut. Dapat diketahui beberapa manfaat pentingnya suatu proses dalam implementasi kebijakan yang dijalankan dilapangan antara lain:

1. Mengetahui tingkat efektifitas implementor dalam menjalankan suatu program atau kebijakan.
2. Mengetahui langsung apa kondisi masyarakat
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur lembaga yang lebih informative dalam menjalankan sebuah kebijakan
4. Sebagai wujud riil sebuah implementasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Manfaat yang diperoleh sebenarnya tidak terbatas pada 4 hal diatas karena masih banyak hal positif lainnya.

## **6.2 Saran**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas penulis memerikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan proses sosialisasi pemerintah khususnya lembaga atau implementor terkait dengan masyarakat dalam proses pengimplementasian Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
2. Perlunya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan baik antara pemerintah dalam artian pembuat kebijakan KIP dengan implementor atau lembaga yang menjalankan kebijakan KIP tersebut.
3. Pemerintah serta lembaga terkait seharusnya dpat lebih menampung aspirasi masyarakat.
4. Perlunya pemerintah meningkatkan efektifitas kerja guna mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah dibuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Abdul Wahab. Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.**

- Abdul Wahab, Solichin.2004.** Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. **Jakarta: Bumi Aksara**
- Abdul Wahab, Solichin, 1997.** *Evaluasi kebijakan Publik.* **Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang**
- A.G. Subarsono,** Analisis Kebijakan Publik, **Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 90-94.**
- Aritonang, R. Lerbin, R. (2007).** *Teori dan Praktik Riset Pemasaran.***Bogor: Ghalia Indonesia**
- Bambang Sunggono, 1994,** *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik,***Sinar Grafika, Jakarta**
- Bungin, Burhan. 2001.** *Metodologi Penelitian Sosial.***Surabaya : Universitas Airlangga.**
- Charles O. Jones Agustino Leo. 2008.** *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* **Bandung: Alfabeta**
- Dunn, William N. (2003).** *Analisis Kebijakan Publik.* **Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.**
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985.** *Efektivitas Organisasi* **Jakarta: Erlangga**
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985.** *Efektivitas Organisasi* **Jakarta: Erlangga**
- Hoogerwerf , Sjahrir, 1988,** *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan,***Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.**
- Kurniawan, Agung. (2005).** *Transformasi Pelayanan Publik.* **Yogyakarta: PEMBARUAN.**
- Koentjaraningrat. 1991.** *Metode Penelitian Masyarakat.* **Jakarta :Universitas Indonesia (UI-Press)**
- Kriyantono, Rachmat. 2008.** *Teknik Praktis Riset Komunikasi:Disertai Contoh Praktis Riset Media, PublicRelations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran.***Jakarta: Kencana Prenada Media Group**
- Moleong, L. J. 2010.** *Metodologi Penelitian Kualitatif,* **Bandung: Remaja Rosda karya**
- Moleong, Lexy J. (2010).** *Metodologi Penelitian Kualitatif.* **Bandung: PT. RemajaRosdakarya**
- Mukhtar Widodo,** *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif,***Ayyrrouz, Yogyakarta, 2000.**
- Notoatmodjo, Soekijo. 2010.** *Metodologi Penelitian Kesehatan.* **Penerbit PT. RinekaCipta. Jakarta**
- Poerwadarminta, W.J.S.** *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* **Jakarta, Balai Pustaka, 1990**
- Setiawan, Guntur. (2004).** *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.* **Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.**
- S. P. Siagian (1978:77)** *Terori Motivasi dan Aplikasinya,* **Jakarta: Bina Aksara**
- Sugiyono, (2008).** *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* **Bandung Alfabeta.**

**Sugiyono. (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET**

**Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.**

**Perpres No 166 Tahun 2014 *tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.**

**Permendikbud No.12 Tahun 2015 *tentang Program Indonesia Pintar*,**

<http://www.sekolahdasar.net/2015/02/inilah-cara-mendapatkan-kartu-indonesia-pintar.html#ixzz4AMO24kH9>

## LAMPIRAN A : DOKUMENTASI

### Wawancara dengan Informan





